

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat, sistem informasi yang efektif dan akuntabilitas sangat diperlukan oleh para pelaku usaha sebagai penunjang sukses dan berhasilnya sebuah rencana yang diinginkan. Kecepatan penyampaian informasi dan akses data merupakan satu media pendukung suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan. Perkembangan IT (*Information Technology*) di era globalisasi ini sangatlah pesat. Seseorang akan dengan mudah mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Peran IT kini semakin penting, karena IT telah mencakup di segala bidang. Salah satu bidang yang memerlukan peran IT dalam aktivitasnya adalah koperasi unit desa.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan adalah **Koperasi Unit Desa** (KUD). KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya koperasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian karena kebanyakan masyarakat desa bekerja di sektor agraria atau pertanian.

Dalam perkembangannya, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam,

pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan.

KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi, termasuk KUD, adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya KUD masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang tak sedikit, kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan terjamin, bahkan pada aspek yang lebih luas masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya.

Peran KUD bagi Pembangunan Desa dan Ekonomi Nasional tak dapat dipungkiri bahwa KUD memiliki peran dan manfaat yang luar biasa pentingnya bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian. Sektor pertanian terus didorong agar lebih produktif serta mampu swasembada. Begitu pun dengan sektor-sektor lainnya seperti peternakan, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Berbagai sektor tersebut dipacu agar mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Selain berperan penting dalam bidang perekonomian, KUD juga memiliki peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diketahui masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibanding masyarakat kota. Oleh karena itu perlu mobilisasi secara digital dalam rancang bangun keberlangsungan koperasi unit desa dalam hal pelayanannya kepada masyarakat dengan sistem informasi yang memadai yang bisa diakses semua orang.

Peranan IT sebagai penyokong kegiatan tersebut akan membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan segala informasi yang diinginkan secara cepat, lengkap dan akurat. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung dan membantu pimpinan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi bisnisnya sehingga bisnisnya dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan para kompetitornya.

Karenanya suatu sistem informasi yang tepat dan optimal akan mampu meningkatkan kinerja pelaku usaha, yang pada akhirnya nanti dengan aspek-aspek yang lain akan mampu mewujudkan suatu kemajuan bagi usaha tersebut. Analisis dan perancangan sistem informasi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai arus keuangan bagi para pemakai di seluruh pelaku usaha, dengan demikian adanya kebutuhan informasi yang makin lama makin meningkat, maka diperlukan suatu sistem yang baik untuk memudahkan semua proses.

Proses transaksi yang biasanya dilakukan manual tidak lagi menjadi pilihan utama dimana akan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini proses pencatatan, dan perhitungan secara manual tidak lagi efisien sehingga membutuhkan sistem yang dapat memenuhi dan mempermudah dalam proses pencatatan dan perhitungan data keuangan. Pemakaian komputer sebagai alat pengolah data dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan waktu dalam mengolah data.

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang merupakan representasi bentuk usaha yang konstitusional bagi bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dimana

dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Konsekuensi logisnya adalah seyogyanya bahwa bangunan nasional harus senantiasa memberikan ruang dan gerak yang lebih besar kepada pengembangan koperasi untuk nantinya dapat lebih berperan karena dianggap merupakan wujud dari eksistensi ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaannya, koperasi dijalankan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasi (Reksohardiprodjo, 1995).

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan.

Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya melihat kebutuhan anggota beraneka ragam, maka usaha

koperasi multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Koperasi yang termasuk dalam *multipurpose* adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Jambi. Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Jambi ini berada di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kuala Jambi. KUD ini bergerak sebagai KUD *multipurpose* dikarenakan banyaknya usaha terutama UMKM di daerah Kuala Jambi yang bermacam ragam, seperti agraria, perairan dan usaha pengelolaan dan produksi. KUD ini juga dibuka untuk meningkatkan keinginan usaha masyarakat di Kuala Jambi, pemerintahan setempat pun sangat mendukung dengan adanya KUD ini, sehingga memiliki kemungkinan besar untuk KUD ini terus berkembang.

KUD Kuala Jambi telah didirikan mulai tahun 2013, yang didirikan oleh Bapak Darman Joni yang saat itu merupakan seorang kepala sekolah di salah satu SD Negeri di Kuala Jambi. Diawali dengan melakukan musyawarah terutama dengan para wali murid yang memiliki usaha pada saat itu untuk mengusulkan pendirian suatu unit koperasi, dan saat pembentukan tersebut kebanyakan anggota koperasinya merupakan seorang guru, namun sasarannya tetap untuk masyarakat terutama yang telah memiliki suatu usaha. Hingga saat ini KUD Kuala Jambi telah banyak memiliki anggota dan nasabah, dengan jumlah anggota pengurus koperasi yaitu 20 orang yang diantaranya 9 orang tingkat pendidikannya adalah S1, 9 orang tingkat pendidikannya SMA, dan 2 orang lainnya merupakan SMP. Dan memiliki lebih dari 15 anggota non pengurus.

KUD Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur saat ini masih menerapkan sistem akuntansi secara manual, artinya menggunakannya dalam format kertas

sehingga sering terjadi keteledoran dalam pencatatan dan penyimpanan data dan juga tidak efisien. Sistem akuntansi manual adalah sistem dimana sebagian besar aktivitas proses data dilakukan orang tanpa bantuan komputer (Romney 2000:750). Sistem manual memiliki banyak kekurangan yang sering terjadi yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan, dikarenakan keteledoran pegawai atau *human errors*. Dalam pengolahan data diperlukan waktu yang lebih lama, sehingga mempengaruhi kinerja KUD Kuala Jambi menjadi tidak efektif dan jika penyimpanan data-data semua itu dalam tumpukan kertas maka ada banyak konsekuensi yang bisa timbul. Dokumen kertas dapat dengan mudah hilang dan rusak, mungkin juga bisa kehilangan dokumen-dokumen transaksi terdahulu sewaktu-waktu.

Informasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi KUD Kuala Jambi dalam menjalankan kegiatannya, dimana terdapat pihak internal dan pihak eksternal yang juga memberikan pengaruh dalam pemberian maupun penerimaan informasi terutama terkait *purchases order*. *Purchase Order* (PO) adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. *Purchase order* juga merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Berbeda dengan *invoice*, yang dibuat oleh penjual dan dikirim ke pembeli, *purchase order* (PO) berasal dari pembeli dan dikirim ke penjual. *Purchase Order* adalah dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok. Jenis barang, kuantitas, harga dan nomor *purchase order* secara umum tertera pada dokumen PO. Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang

disertakan dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif. Namun dalam kenyataannya KUD Kuala Jambi belum bisa melakukan proses pencatatan yang baik terhadap *purchase order*, karena dalam proses *purchase order* KUD Kuala Jambi hanya melakukan pengisian selebaran form *purchase order* yang sebelumnya telah dicetak yang penginputan datanya ditulis secara manual, pencatatan lanjutnyapun belum memenuhi standar akuntansi keuangan (SAK) akibatnya adalah akan menimbulkan dampak terhadap laporan posisi keuangan, kesalahan pengalokasian biaya, dan kesalahan dalam memasukan jumlah.

Sistem akuntansi *purchases order* merupakan bagian penting dalam siklus akuntansi yang digunakan oleh suatu KUD sebagai sarana penunjang kegiatan operasional. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam SAK (IAI, 2007:23). Untuk memenuhi kebutuhan informasi *purchases order* bagi pihak *eksternal* maupun *internal*, maka disusun suatu sistem akuntansi. Kemampuan teknologi informasi yang berkembang saat ini memungkinkan adanya perancangan sistem informasi akuntansi sebagai alat bantu dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berguna dalam tiap koperasi unit desa. Dalam hal ini KUD Kuala Jambi telah didukung dengan ketersediaan fasilitas (perangkat keras dan lunak) untuk mendorong perkembangan pencatatan secara digitalisasi.

Perkembangan Teknologi Infomasi juga akan mendukung perkembangan SIA (Sistem Informasi Akuntansi). SIA dapat dikatakan sebagai prosedur pencatatan dan melaporkan berbagai informasi yang berkaitan dengan keuangan suatu perusahaan. Sebelum IT berkembang dengan pesat, prosedur SIA hanya

dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan mengikuti perkembangan IT yang semakin pesat, prosedur SIA pun kini telah dilakukan secara digitalisasi. Beberapa bisnis retail perlahan ingin menerapkan SIA yang terkomputerisasi guna mengembangkan bisnisnya.

Semua kegiatan yang berhubungan dengan segala hal termasuk sistem akuntansi disuatu koperasi unit desa harusnya mulai menggunakan sistem secara digitalisasi untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Tidak hanya peralatan komputer biasa namun peralatan komputer yang telah didukung dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi akan menyebabkan perkembangan sistem basis data yang juga disebabkan karena tuntutan kebutuhan dan permasalahan akan pengolahan data yang semakin banyak dan kompleks. Menurut Jogiyanto (1990:129) analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian dan komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Sistem akuntansi terdiri dari orang, prosedur, dan teknologi informasi yang semuanya melaksanakan tiga fungsi penting didalam organisasi terutama KUD yaitu mengumpulkan, menyimpan dan memproses data penerimaan *purchases order* baik secara tunai maupun secara kredit sehingga menjadi informasi yang berguna, dan menyediakan kontrol atau pengendalian untuk menjaga data *purchases order* (Romney 2000:2). Sistem akuntansi juga mampu memberikan sebuah efisiensi dan efektifitas dalam pemrosesan data. Namun hal

tersebut tidak dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya landasan pencatatan yaitu dengan berdasarkan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK adalah hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP, selain itu ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. SAK berfungsi untuk keseragaman laporan keuangan, selain itu, SAK juga berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda.

Salah satu koperasi unit desa yang ingin mencoba menerapkan SIA secara digitalisasi tersebut adalah KUD Kuala Jambi. Hal ini diyakini dapat diterapkan karena KUD Kuala Jambi telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pencatatan secara digitalisasi, KUD Kuala Jambi memiliki anggota yang kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang tentunya para anggota tersebut cukup fasih dalam menggunakan perangkat komputer dan dengan arahan yang diberikan diharapkan anggota mampu dalam mengaplikasikan sistem pencatatan yang ingin dirancang. KUD Kuala Jambi juga memiliki perangkat *software* dan *hardware* yang juga merupakan persyaratan penting dalam pencatatan secara digitalisasi ini.

Dalam menjalankan prosedur SIA yang digunakan saat ini, KUD Kuala Jambi mengalami beberapa permasalahan, antara lain: 1) KUD Kuala Jambi hanya

memiliki dokumen tanpa data cadangan secara komputerisasi, 2) KUD Kuala Jambi tidak melakukan pencatatan *purchases order*, 3) KUD Kuala Jambi kurang memaksimalkan pemanfaatan fasilitas komputer yang dimiliki. Sampai saat ini KUD sudah menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan penyusunan laporan keuangan yang berlaku umum. Meskipun demikian keinginan dari KUD tersebut adalah perbaikan dan peningkatan kualitas usahanya. Hal ini dapat dilihat dari sisi laporan keuangan yang dihasilkan dari KUD tersebut. Kondisi keuangan KUD tersebut akan dapat diketahui dari neraca, perhitungan sisa hasil usaha (laporan laba rugi), serta laporan-laporan keuangan lainnya. Dari laporan keuangan belum cukup untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan perusahaan.

KUD Kuala Jambi membutuhkan suatu analisa laporan keuangan untuk membantu pemilik dalam pengambilan keputusan. Selama ini KUD masih menggunakan cara yang sederhana dalam menilai kinerja keuangan perusahaan hanya melihat neraca dan laba rugi saja. Alat analisisnya juga belum mendukung secara maksimal dalam menilai kinerja keuangan walaupun dibantu menggunakan sistem excel dalam perhitungan dan penarikan kesimpulan. Kegagalan seringkali terjadi pada saat menilai kinerja keuangan yang dikarenakan alat analisis keuangan kurang lengkap/valid dan tidak efektif karena masih dilakukan secara manual. Sistem akuntansi *purchases order* KUD Kuala Jambi masih dilaksanakan secara manual sehingga penyimpanan data tidak tersimpan secara baik dan menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan, penjumlahan, data yang hilang, serta penyajian laporan yang tidak tepat waktu.

Sistem akuntansi yang dilakukan secara manual menyebabkan beberapa permasalahan yaitu mengharuskan pemilik menyesuaikan unit barang yang dibeli

dengan catatan manual yang ada dan akan diperlukan waktu yang lebih lama, dan jelas akan menghambat dalam pelaporan *purchases order* yang tidak diketahui hasilnya tidak signifikan karena dicatat dan dihitung secara manual. Dapat terjadinya kesalahan dalam penjumlahan atau pencatatan dikarenakan karyawan yang kurang cermat. Belum adanya pengendalian intern terhadap sistem akuntansi *purchases order* sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan data tanpa adanya pengendalian pada sistem.

Keuntungan-keuntungan dari melakukan pencatatan secara digitalisasi adalah adanya penghematan biaya yaitu pemilik tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk membeli dokumen berupa nota dan buku tulis untuk pencatatan dan pengurangan terjadinya kesalahan. Data mudah untuk disimpan, diolah, dicari, diakses dan tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar, diperbaharui berdasarkan kemampuan serta dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Proses penginputan data juga lebih efektif dan efisien dan tidak perlu khawatir data akan hilang. Dan juga beberapa keuntungan jika KUD Kuala Jambi menerapkan sistem akuntansi secara digitalisasi adalah data yang ada dapat sistem diterapkan dengan menggunakan kode sehingga kita dapat memperoleh data yang kita inginkan dengan rahasia, mudah dan cepat. Dan kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam mengitung hasil akhir juga sangat kecil. Keuntungan lainnya adalah Sistem Akuntansi secara digitalisasi dapat mencatat data-data non keuangan.

Semakin meningkatnya *purchases order* dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan KUD Kuala Jambi mengalami kesulitan untuk melakukan penyimpanan maupun pemrosesan data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan tidak tepat. Sistem akuntansi *purchases order*

digunakan untuk menentukan aturan dalam *purchases order*. Dokumen apa saja yang digunakan, siapa yang mengurus, dan berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan turunan variabel payung penelitian dosen Pendidikan Ekonomi tahun 2019 dengan judul *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Anwarreport Secara Komputerisasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS Pada Worksheet Paper Mahasiswa*. Alasan penulis mengembangkan model perancangan ini karena KUD Kuala Jambi belum melakukan pencatatan *purchase order* menggunakan sistem secara *dekumented* dan perancangan sistem masih menggunakan prosedur manual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model SDLC dengan pendekatan model *waterfall* dengan tahapan pengembangan sistem melalui enam tahap, namun tahapan pada penelitian ini hanya dilaksanakan sebatas empat tahap yang artinya peneliti hanya melakukan hanya pada sampai tahapan *testing* (uji coba besar/lapangan), dan untuk tahapan *deployment* dan *maintenance* peneliti belum melakukan tahapan tersebut, karena tahapan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang dan masih kurangnya pengetahuan, dan kurangnya kesanggupan dari peneliti dalam pelaksanaan.

Dari uraian diatas penulis merasa perlu adanya sebuah inovasi baru dalam KUD Kuala Jambi agar mampu bertahan dalam persaingan dan mampu membuat laporan *Purchase Order* yang nantinya akan menjadi pedoman implikasi dimasa yang akan datang. Melalui perancangan sistem secara terkomputerisasi diharapkan dapat membantu KUD Kuala Jambi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pencatatan, penyimpanan data-data *purchases order*, hingga pelaporan

yang sebelum ini dilakukan secara manual, sehingga penulis mengambil judul **“Perancangan *Purchases Order* Secara Digitalisasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan pada KUD Kuala Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan, Bagaimanakah rancangan dan implementasi sistem akuntansi *purchases order* secara digitalisasi yang sesuai dan layak untuk KUD Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur ?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar pembahasan masalah dapat lebih berfokus dan spesifik. Adapun pembatasan masalah, antara lain:

1. Perancangan sistem informasi akuntansi yang tepat meliputi perancangan input, proses, output, basis data, dokumen dan teknologi pada KUD Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur.
2. Perancangan dan implementasi sistem akuntansi *purchases order* secara digitalisasi dirancang berdasarkan kebutuhan KUD Kuala Jambi dan kelayakan investasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Merancang dan mengimplementasikan sistem akuntansi *purchases order* secara digitalisasi yang sesuai dan layak untuk KUD Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretik

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber data dan sumber bacaan dalam melangsungkan penelitian di masa yang akan datang.

2. Bagi Kuala Jambi

Bagi KUD Kuala Jambi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan mengenai sistem informasi akuntansi *purchase order* dan sumbangan pemikiran tentang pengembangan sistemnya.

1.5.2 Manfaat Tata Laksana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja KUD Kuala Jambi, dapat membantu mengefesiensikan pencatatan dan dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat.